

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN CIGOMBONG

Aqso Bintang Nusantara^{1*}, Irma Purnamasari², Deny Hernawan³, Faisal Tri
Ramdani⁴.

¹ Aqso Bintang Nusantara, fidelaqsho@gmail.com

² Irma Purnama Sari, irma.purnamasari@unida.ac.id

³ Deny Hernawan, denny.hernawan@unida.ac.id

⁴ Faisal Tri Ramdani, faisaltr@unida.ac.id

Dst.

"

ABSTRAK

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pencegahan stunting di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada pegawai serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan stunting di Kecamatan Cigombong dinilai "Sangat Baik", dengan skor rata-rata 4,33 dari pegawai dan 4,49 dari masyarakat. Dimensi komunikasi memperoleh nilai tertinggi, menunjukkan efektivitas dalam penyampaian informasi dan sosialisasi program. Namun, dimensi sumber daya masih menghadapi tantangan pada jumlah kader posyandu dan sarana prasarana yang belum merata. Pada dimensi disposisi, terdapat perbedaan persepsi signifikan antara pegawai dan masyarakat terkait kepedulian gizi anak. Sementara itu, struktur birokrasi dinilai baik oleh kedua pihak, khususnya dalam aspek koordinasi dan evaluasi program. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun implementasi berjalan optimal, peningkatan kualitas kader, penguatan komunikasi, dan koordinasi lintas sektor tetap diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Stunting, Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Kecamatan Cigombong

PENDAHULUAN

Stunting, atau kondisi anak bertubuh pendek akibat kekurangan gizi kronis, pertama kali diperkenalkan oleh J.C. Waterlow pada tahun 1973. Hingga kini, stunting masih menjadi isu kesehatan global yang terus menjadi sorotan. Pada tahun 2022 diperkirakan terdapat sekitar 148,1 juta balita di seluruh dunia atau sekitar 22,3% yang mengalami stunting. Istilah "stunting" pertama kali digunakan oleh J.C. Waterlow pada tahun 1973 untuk menggambarkan kondisi defisit tinggi badan berdasarkan usia (UNICEF, 2021). Anak yang mengalami stunting umumnya mengalami pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi kronis, yang dimulai sejak dalam kandungan hingga usia dini. Akibatnya, mereka tumbuh lebih pendek dari anak seusianya. Kondisi ini membuat anak memulai hidup dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Dampaknya pun tidak berhenti di masa kanak-kanak. Tinggi badan mereka kemungkinan besar tidak akan mencapai potensi maksimal, dan perkembangan otaknya pun terhambat. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam perkembangan kognitif yang seharusnya bisa dicapai. Dampak negatif dari stunting bisa berlangsung seumur hidup dan bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. (Sofyan, 2024)

Kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang, terutama sejak 1.000 hari pertama kehidupan, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya stunting. Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimulai sejak hari pertama terjadinya konsepsi dan merupakan periode paling krusial dalam proses tumbuh kembang anak (Hutabarat, 2022). Periode ini mencakup 270 hari selama kehamilan dan 730 hari atau dua tahun pertama kehidupan anak. Untuk mendukung pertumbuhan optimal pada masa ini, sangat penting menerapkan pola makan dengan gizi seimbang sejak masa kehamilan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif serta makanan pendamping ASI (MPASI) yang bernutrisi tepat pada usia yang sesuai. (Kemenkes, 2022) Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang berdampak pada perkembangan fisik dan otak. Kondisi ini disebabkan oleh

kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, yang biasanya terjadi sejak masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan atau yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki postur tubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya dan mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif (Kemenkes, 2022)

Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi stunting di tingkat nasional menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir, mencerminkan keberhasilan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi kronis pada anak. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting nasional berada pada tingkat 27,3%, menandakan bahwa lebih dari satu dari empat anak balita mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi jangka panjang. Melalui penguatan program nasional seperti intervensi gizi spesifik dan sensitif, integrasi layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 24,4% pada 2021, lalu menurun lagi menjadi 21,6% di 2022. Pencapaian ini menunjukkan adanya dampak nyata dari kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Pada 2023, prevalensi tercatat sebesar 21,5%, mempertahankan penurunan yang stabil meskipun dengan selisih yang sangat tipis dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat, namun tantangan dalam menjangkau kelompok rentan, meningkatkan kualitas intervensi di tingkat daerah, dan memperkuat sistem pemantauan tetap perlu menjadi perhatian utama. Secara keseluruhan, capaian ini merupakan hasil kerja bersama dari pemerintah pusat hingga desa, yang harus terus ditingkatkan agar target nasional penurunan prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2024 dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan. (BPS Kabupaten Bogor, 2024)

Berdasarkan data prevalensi stunting di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat adanya dinamika dalam penanganan masalah gizi anak. Pada tahun 2019, prevalensi stunting tercatat sebesar 34,9% , menunjukkan tingginya angka kasus anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat

kekurangan gizi kronis. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan mulai menunjukkan hasil pada tahun 2021, dengan prevalensi menurun menjadi 28,6% , dan kembali menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 24,9% . Penurunan ini mencerminkan peningkatan efektivitas intervensi, baik melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan, maupun program bantuan pangan.

Untuk menunjang keberhasilan program ini, Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.2/113/Kpts/Per-UU/2023 menetapkan Tim Pendamping Keluarga sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting di tingkat lapangan. Keputusan ini merupakan bentuk perubahan dari keputusan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, dan secara resmi mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2023. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam percepatan penurunan angka stunting, berbagai program strategis dan inovatif telah dikembangkan. Salah satunya adalah Go-Best (Gerakan Bogor Bebas Stunting), sebuah inisiatif kolaboratif lintas sektor yang menargetkan penurunan stunting melalui intervensi sensitif dan spesifik sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Go-Best mencakup peningkatan akses sanitasi, air bersih, edukasi gizi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pemenuhan gizi anak dan ibu pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Implementasinya dilakukan melalui penetapan lokus prioritas desa berdasarkan data risiko stunting, serta penguatan kapasitas kader posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlibat dalam pemantauan gizi, edukasi, dan fasilitasi layanan rujukan. Kegiatan seperti penimbangan balita, pemberian layanan dasar, Rembuk Stunting berkala, dan Audit Kasus Stunting turut diintegrasikan dengan dukungan sistem monitoring digital. Program ini juga menggandeng sektor swasta melalui skema Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dan pemanfaatan CSR, sehingga Go-Best menjadi gerakan sosial yang tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat serta ketahanan keluarga dalam aspek kesehatan dan gizi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Cigombong, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pencegahan stunting yang dapat dianalisis melalui empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Salah satu kendala utama terletak pada dimensi komunikasi. Sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang, baik untuk ibu hamil maupun balita, belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Informasi mengenai kebutuhan gizi anak serta praktik pemberian makan yang benar dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seringkali tidak dipahami oleh keluarga sasaran. Hal ini menyebabkan banyak orang tua, khususnya ibu, belum menyadari dampak buruk dari pola makan yang tidak seimbang terhadap tumbuh kembang anak. Rendahnya literasi gizi ini berakibat pada terbatasnya perubahan perilaku, meskipun program telah berjalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif sebagai pendekatannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020), Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan bantuan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Informasi yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau menjelaskan fenomena berdasarkan data numerik yang diperoleh

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait objek kajian. Adapun teknik yang digunakan meliputi :

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan landasan teoritis, konsep kunci, dan informasi pendukung dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan (Field Research), Dilakukan untuk memperoleh informasi empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan dalam studi lapangan ini antara lain:
 - a. Wawancara, Digunakan untuk menggali informasi langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam isu penelitian. Metode ini membantu mengidentifikasi permasalahan secara lebih jelas dan mendalam (Sugiyono, 2020)
 - b. Observasi, Dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan untuk mencatat fakta terkait sistem drainase, proses pemeliharaan, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan
 - c. Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti regulasi, laporan, arsip, foto, dan sumber relevan lainnya (Sugiyono, 2020)
 - d. Kuesioner (Angket), Disebarkan kepada responden dari pegawai dan masyarakat kecamatan Cigombong yang dipilih sebagai sampel. Instrumen ini berisi pertanyaan untuk mengukur persepsi dan pengetahuan responden, dengan skala Likert sebagai dasar penilaian.

Penelitian ini melibatkan 11 responden pegawai, Responden dipilih berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan mereka tentang Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Pendekatan ini bertujuan menggali Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Kecamatan Cigombong

HASIL DAN PEMBAHASAN (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

1. Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Dalam pelaksanaan Implementasi Program Pencegahan Stunting di Kecamatan Cigombong, digunakan pendekatan berdasarkan teori implementasi

kebijakan dari George Edward. Teori ini mencakup empat aspek utama, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, diperoleh tanggapan responden terhadap indikator dari masing-masing dimensi dalam implementasi kebijakan tersebut, yang hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu indikator yang krusial dan tidak dapat diabaikan dalam situasi apa pun. Tanggapan para responden terhadap dimensi komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sejumlah indikator. Rincian tanggapan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No	Item Pertanyaan	Pegawai		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Informasi tentang program pencegahan stunting disampaikan secara jelas kepada masyarakat	4,90	Sangat Baik	4,7	Baik
2	Sosialisasi program stunting menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga berisiko	4,81	Sangat Baik	4,7	Baik
3	Materi edukasi gizi mudah dipahami oleh masyarakat	4,54	Sangat Baik	4,4	Baik
4	Kader posyandu secara rutin memberikan informasi terbaru terkait stunting	4,54	Sangat Baik	4,53	Sangat Baik
Jumlah		4,69	Sangat Baik	4,58	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Mengacu pada tabel di atas, secara keseluruhan implementasi program pencegahan stunting memperoleh penilaian yang sangat baik dari kedua kelompok responden. Pegawai memberikan nilai rata-rata sebesar 4,69 dan masyarakat sebesar

4,58, keduanya berada dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sudut pandang internal maupun penerima manfaat, pelaksanaan program pencegahan stunting telah berjalan dengan optimal.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan persepsi antara pegawai dan masyarakat pada indikator tertentu. Pada indikator penyampaian informasi program pencegahan stunting, pegawai menilai sangat tinggi (4,90 – Sangat Baik), sementara masyarakat memberikan nilai lebih rendah (4,7 – Baik). Pola serupa juga terlihat pada indikator sosialisasi program yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, di mana pegawai menilai 4,81 – Sangat Baik, sedangkan masyarakat menilai 4,7 – Baik. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun program telah dijalankan dengan baik, sebagian masyarakat masih merasa bahwa informasi dan sosialisasi belum sepenuhnya merata.

Pada indikator lainnya, yaitu materi edukasi gizi dan peran kader posyandu, hasil penilaian relatif serupa. Pegawai menilai materi edukasi gizi mudah dipahami dengan nilai 4,54 “Sangat Baik”, sedangkan masyarakat memberikan nilai lebih rendah yaitu 4,4 “Baik”. Sementara itu, untuk rutinitas kader posyandu dalam memberikan informasi terbaru, baik pegawai maupun masyarakat memberikan penilaian yang hampir sama, yaitu 4,54 dan 4,53, keduanya dalam kategori Sangat Baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa kader posyandu berperan penting dalam menjaga keberlanjutan informasi di masyarakat, meskipun aspek pemahaman materi masih perlu ditingkatkan dengan bahasa sederhana dan contoh yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

B. Sumber Daya

Tanggapan responden terhadap dimensi sumber daya dapat diklasifikasikan berdasarkan sejumlah indikator. Adapun hasil dari masing-masing indikator terkait sumber daya disajikan dalam tabel berikut:

No	Item Pertanyaan	Pegawai		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian

1	Jumlah kader posyandu cukup untuk melaksanakan program pencegahan stunting.	4	Baik	4,03	Baik
2	Kader posyandu memiliki kemampuan dan pelatihan yang memadai dalam memberikan edukasi gizi.	4,27	Sangat Baik	4,5	Baik
3	Sarana dan prasarana posyandu (alat timbang, PMT, fasilitas kesehatan) tersedia dengan baik.	4,09	Baik	4,26	Sangat Baik
4	Dana operasional mendukung kelancaran program pencegahan stunting di desa/kelurahan.	4,36	Sangat Baik	4,36	Sangat Baik
Jumlah		4,18	Baik	4,28	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan Tabel 4.15, rekapitulasi indikator pada dimensi Sumber Daya menunjukkan bahwa baik pegawai maupun masyarakat memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya dalam mendukung program pencegahan stunting. Pegawai memberikan rata-rata 4,18 dengan kategori “Baik”, sedangkan masyarakat memberikan rata-rata 4,28 dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum kedua kelompok menilai ketersediaan sumber daya sudah memadai, meskipun terdapat perbedaan persepsi pada beberapa indikator.

Perbedaan cukup mencolok terlihat pada indikator pertama, yaitu jumlah kader posyandu. Pegawai menilai pada kategori “Baik” (4,00), sementara masyarakat memberikan penilaian hampir sama (4,03) dengan kategori “Baik”. Sementara itu, pada indikator kemampuan kader, pegawai menilai lebih tinggi (4,27 – “Sangat Baik”) dibanding masyarakat (4,5 – “Baik”). Sebaliknya, pada indikator sarana prasarana,

masyarakat menilai lebih tinggi (4,26 – “Sangat Baik”) dibanding pegawai (4,09 – “Baik”). Untuk indikator terakhir mengenai dukungan dana operasional, baik pegawai maupun masyarakat sama-sama memberikan penilaian sangat positif (4,36 – “Sangat Baik”), menunjukkan kesepahaman bahwa aspek pendanaan sudah memadai.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan kecil dalam persepsi, secara umum pegawai dan masyarakat sama-sama menilai ketersediaan sumber daya mendukung kelancaran program pencegahan stunting. Namun, adanya perbedaan pandangan pada aspek kemampuan kader dan sarana prasarana mengindikasikan perlunya perhatian lebih, khususnya terkait pemerataan kualitas kader dan peningkatan fasilitas posyandu agar pelayanan dapat semakin optimal. Dengan demikian, dukungan sumber daya yang sudah baik perlu terus dijaga dan diperkuat agar program pencegahan stunting tidak hanya berjalan lancar secara administratif, tetapi juga dirasakan nyata manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah.

C. Disposisi

Tanggapan para responden terhadap dimensi disposisi dapat diklasifikasikan berdasarkan sejumlah indikator. Rincian hasil tanggapan untuk setiap indikator dalam dimensi disposisi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Item Pertanyaan	Pegawai		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Kader posyandu memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pencegahan stunting.	4,27	Sangat Baik	4,43	Sangat Baik
2	Masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya gizi anak.	3,72	Baik	4,46	Sangat Baik
3	Ibu hamil dan keluarga balita aktif	4,54	Sangat Baik	4,8	Baik

	mengikuti kegiatan posyandu.				
4	Pemerintah desa/kelurahan mendukung penuh kegiatan pencegahan stunting.	4,54	Sangat Baik	4,56	Sangat Baik
Jumlah		4,15	Baik	4,56	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Mengacu pada Tabel 4.20, ringkasan penilaian untuk dimensi Disposisi menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pegawai dan masyarakat terkait sikap, komitmen, serta dukungan dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Pegawai memberikan rata-rata penilaian sebesar 4,15 yang berada pada kategori *Baik*, sementara masyarakat memberikan rata-rata lebih tinggi yaitu 4,56 dengan kategori *Sangat Baik*. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa masyarakat menilai aspek disposisi, terutama terkait komitmen kader, kepedulian, dan dukungan pemerintah, sudah berjalan dengan sangat baik, sedangkan pegawai masih melihat adanya beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Perbedaan paling menonjol terlihat pada indikator kedua, yaitu kepedulian masyarakat terhadap pentingnya gizi anak. Pegawai menilai dengan kategori *Baik* (3,72), sementara masyarakat menilai jauh lebih tinggi dengan kategori *Sangat Baik* (4,46). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pandangan, di mana dari sisi internal pegawai menilai partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, namun masyarakat merasa kepedulian mereka sudah cukup tinggi. Pada indikator lain, seperti komitmen kader posyandu dan dukungan pemerintah desa/kelurahan, kedua kelompok memberikan penilaian yang relatif serupa dan tinggi, sama-sama berada pada kategori *Sangat Baik*.

Sementara itu, pada indikator keaktifan ibu hamil dan keluarga balita dalam kegiatan posyandu, pegawai memberikan penilaian yang lebih tinggi (4,54 – *Sangat Baik*) dibanding masyarakat (4,8 – *Baik*). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai melihat

partisipasi sasaran program sudah optimal, sedangkan masyarakat merasa masih ada sebagian ibu hamil dan keluarga balita yang belum konsisten berpartisipasi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan disposisi, khususnya dalam meningkatkan sinergi antara komitmen kader, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah. Dengan demikian, meskipun dimensi disposisi sudah mendapat penilaian tinggi, penguatan komunikasi, edukasi berkelanjutan, dan pelibatan aktif seluruh lapisan masyarakat tetap diperlukan agar upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih merata dan berkesinambungan.

D. Struktur Birokrasi

Tanggapan responden terhadap dimensi Struktur Birokrasi dapat dikelompokkan dengan berdasarkan indikator-indikator, adapun hasil tanggapan dari indikator-indikator struktur birokrasi bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut.

NO	ITEM PERTANYAAN	PEGAWAI		MASYARAKAT	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Koordinasi antar instansi (desa, puskesmas, kecamatan, posyandu) berjalan baik	4,36	Sangat Baik	4,4	Baik
2	Sudah ada SOP yang jelas terkait program pencegahan stunting	4,09	Baik	4,3	Baik
3	Sistem pendataan kasus stunting dilakukan dengan baik	4,36	Sangat Baik	4,66	Sangat Baik
4	Forum evaluasi program pencegahan stunting rutin dilakukan	4,45	Sangat Baik	4,8	Baik
JUMLAH		4,31	Sangat Baik	4,54	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Mengacu pada Tabel 4.25, ringkasan penilaian untuk dimensi Struktur Birokrasi menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antara pegawai dan

masyarakat, meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil dalam penilaian. Pegawai memberikan rata-rata penilaian sebesar 4,31 dengan kategori Sangat Baik, sementara masyarakat memberikan penilaian sedikit lebih tinggi, yakni 4,54 juga dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menandakan bahwa secara umum, baik pegawai maupun masyarakat menilai struktur birokrasi dalam mendukung program pencegahan stunting sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek koordinasi, pendataan, dan forum evaluasi program.

Perbedaan mencolok terlihat pada indikator pertama terkait koordinasi antar instansi (desa, puskesmas, kecamatan, posyandu). Pegawai menilai sangat baik (4,36), sedangkan masyarakat menilai sedikit lebih rendah pada kategori Baik (4,40). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antar lembaga dirasakan cukup baik, masyarakat mungkin masih melihat adanya kendala teknis di lapangan yang perlu ditingkatkan. Pada indikator kedua, yakni keberadaan SOP yang jelas terkait program pencegahan stunting, baik pegawai maupun masyarakat memberikan penilaian dalam kategori Baik (4,09 dan 4,30), yang mengindikasikan bahwa meskipun SOP sudah tersedia, masih diperlukan sosialisasi dan pemantapan agar dapat lebih dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak.

Sementara itu, indikator sistem pendataan kasus stunting mendapatkan penilaian yang tinggi dari kedua kelompok, yaitu 4,36 dari pegawai dan 4,66 dari masyarakat, keduanya masuk kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan sudah berjalan cukup optimal dan diakui oleh kedua belah pihak. Begitu pula pada indikator forum evaluasi program pencegahan stunting, penilaian dari pegawai (4,45) dan masyarakat (4,80) sama-sama tinggi, meskipun masyarakat menilai sedikit lebih rendah dalam kategorinya. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah berjalan sangat baik, tetap diperlukan penguatan dalam koordinasi dan penyempurnaan SOP agar pelaksanaan program pencegahan stunting semakin terarah, efektif, dan berkesinambungan.

Adapun hasil rekapitulasi pada seluruh Dimensi terhadap Variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai		Masyarakat	
			Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Implementasi Kebijakan George C. Edward III	Komunikasi	Informasi tentang program pencegahan stunting disampaikan secara jelas kepada masyarakat	4,90	Sangat Baik	4,7	Baik
		Sosialisasi program stunting menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga berisiko	4,81	Sangat Baik	4,7	Baik
		Materi edukasi gizi mudah dipahami oleh masyarakat	4,54	Sangat Baik	4,4	Baik
		Kader posyandu secara rutin memberikan informasi terbaru terkait stunting	4,54	Sangat Baik	4,53	Sangat Baik
	Rata-Rata		4,69	Sangat Baik	4,58	Sangat Baik
	Sumber Daya	Jumlah kader posyandu cukup untuk melaksanakan program pencegahan stunting	4	Baik	4,03	Baik
		Kader posyandu memiliki kemampuan dan pelatihan yang memadai dalam memberikan edukasi gizi	4,27	Sangat Baik	4,5	Baik

		Sarana dan prasarana posyandu (alat timbang, PMT, fasilitas kesehatan) tersedia dengan baik	4,09	Baik	4,26	Baik
		Dana operasional mendukung kelancaran program pencegahan stunting di desa/kelurahan	4,36	Sangat Baik	4,36	Baik
	Rata-Rata		4,18	Baik	4,28	Sangat Baik
Disposisi		Kader posyandu memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pencegahan stunting	4,27	Sangat Baik	4,43	Sangat Baik
		Masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya gizi anak	3,72	Baik	4,46	Sangat Baik
		Ibu hamil dan keluarga balita aktif mengikuti kegiatan posyandu	4,54	Sangat Baik	4,8	Baik
		Pemerintah desa/kelurahan mendukung penuh kegiatan pencegahan stunting	4,54	Sangat Baik	4,56	Sangat Baik
	Rata-Rata		4,15	Baik	4,56	Sangat Baik
Struktur Birokrasi	Koordinasi antar instansi (desa,	4,36	Sangat Baik	4,4	Baik	

	puskesmas, kecamatan, posyandu) berjalan baik				
	Sudah ada SOP yang jelas terkait program pencegahan stunting	4,09	Baik	4,3	Baik
	Sistem pendataan kasus stunting dilakukan dengan baik	4,36	Sangat Baik	4,66	Sangat Baik
	Forum evaluasi program pencegahan stunting rutin dilakukan	4,45	Sangat Baik	4,8	Baik
	Rata-Rata	4,31	Sangat Baik	4,54	Sangat Baik
	Total Rata-Rata	4,33	Sangat Baik	4,49	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, ditemukan adanya perbedaan persepsi antara pegawai dan masyarakat dalam menilai pelaksanaan program pencegahan stunting di Kecamatan Cigombong. Secara keseluruhan, pegawai memberikan rata-rata penilaian sebesar 4,33 dengan kategori Sangat Baik, sedangkan masyarakat memberikan nilai rata-rata lebih tinggi yaitu 4,49, juga dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan penilaian antar indikator, secara umum implementasi program dipersepsikan berjalan baik oleh kedua kelompok.

Pada dimensi Komunikasi, pegawai memberikan nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,69 (Sangat Baik), sementara masyarakat menilai 4,58 (Sangat Baik). Penilaian ini menegaskan bahwa penyampaian informasi, sosialisasi program, hingga penyediaan materi edukasi gizi dianggap berjalan efektif. Perbedaan kecil terlihat pada indikator "Materi edukasi gizi mudah dipahami", di mana pegawai menilai lebih tinggi (4,54)

dibanding masyarakat (4,40). Dimensi Sumber Daya menunjukkan penilaian yang relatif lebih rendah, dengan rata-rata 4,18 (Baik) dari pegawai dan 4,28 (Sangat Baik) dari masyarakat. Pegawai menilai rendah pada indikator "Jumlah kader posyandu" (4,00), sementara masyarakat memberi nilai rendah pada "Sarana dan prasarana posyandu" (4,26). Hal ini menandakan masih terdapat ruang perbaikan dalam ketersediaan sumber daya manusia maupun sarana pendukung.

Dimensi Disposisi menunjukkan adanya selisih penilaian yang cukup mencolok. Pegawai memberikan rata-rata 4,15 (Baik), sementara masyarakat menilai lebih tinggi yaitu 4,56 (Sangat Baik). Perbedaan terbesar terdapat pada indikator "Masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya gizi anak", di mana pegawai hanya memberi nilai 3,72 (Baik), sedangkan masyarakat memberi 4,46 (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai masih melihat partisipasi masyarakat belum optimal, sedangkan masyarakat menilai kepedulian mereka sudah cukup tinggi. Sementara itu, dimensi Struktur Birokrasi memperoleh nilai tinggi dari kedua pihak, dengan rata-rata 4,31 (Sangat Baik) dari pegawai dan 4,54 (Sangat Baik) dari masyarakat. Indikator dengan penilaian tertinggi dari masyarakat adalah "Forum evaluasi program pencegahan stunting rutin dilakukan" (4,80), sedangkan dari pegawai adalah "Koordinasi antar instansi berjalan baik" (4,36).

Secara keseluruhan, penilaian tertinggi dari pegawai terdapat pada indikator "Informasi tentang program pencegahan stunting disampaikan secara jelas kepada masyarakat" dengan skor 4,90, sedangkan dari masyarakat penilaian tertinggi terdapat pada indikator "Forum evaluasi program pencegahan stunting rutin dilakukan" dengan skor 4,80. Penilaian terendah dari pegawai terdapat pada indikator "Masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya gizi anak" (3,72), sedangkan dari masyarakat terendah adalah "Materi edukasi gizi mudah dipahami oleh masyarakat" (4,40). Selisih terbesar antara kedua kelompok terdapat pada indikator kepedulian masyarakat terhadap gizi anak, yaitu 0,74 poin, yang mengindikasikan perbedaan persepsi signifikan antara pelaksana dan penerima manfaat.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi program pencegahan stunting di Kecamatan Cigombong secara umum telah berjalan dengan sangat baik menurut persepsi kedua kelompok. Namun, adanya selisih penilaian menunjukkan bahwa aspek partisipasi masyarakat, jumlah kader, dan kualitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dua arah, peningkatan kapasitas kader posyandu, serta pemantapan koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar implementasi program tidak hanya dinilai baik secara administratif, tetapi juga semakin efektif dalam menurunkan angka stunting di masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan stunting di Kecamatan Cigombong berada pada kategori **“Sangat Baik”** menurut penilaian pegawai dengan skor rata-rata 4,33 dan masyarakat dengan skor rata-rata 4,49. Penilaian ini mencakup empat dimensi utama dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dimensi komunikasi memperoleh penilaian tertinggi, di mana pegawai memberikan nilai 4,69 dan masyarakat 4,58, yang mengindikasikan bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi program telah berjalan efektif. Pada dimensi sumber daya, penilaian relatif lebih rendah, yakni 4,18 dari pegawai (Baik) dan 4,28 dari masyarakat (Sangat Baik), yang memperlihatkan masih adanya tantangan terkait jumlah kader posyandu dan pemerataan sarana prasarana. Dimensi disposisi memperlihatkan perbedaan pandangan yang cukup signifikan; pegawai menilai 4,15 (Baik), sedangkan masyarakat menilai 4,56 (Sangat Baik), khususnya pada indikator kepedulian masyarakat terhadap gizi anak. Adapun dimensi struktur birokrasi dinilai sangat baik oleh kedua pihak, dengan rata-rata 4,31 (pegawai) dan 4,54 (masyarakat), menunjukkan koordinasi, pendataan, dan evaluasi program telah berjalan optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa program pencegahan stunting di Kecamatan Cigombong telah terlaksana dengan baik, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas kader posyandu, serta pemerataan sarana pendukung. Dengan penguatan komunikasi dua arah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas instansi yang lebih solid, implementasi program diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

REFERENSI (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

UNICEF. (2021). *UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition*. Retrieved from [unicef.org](https://www.unicef.org/media/113291/file/UNICEF%20Conceptual%20Framework):

<https://www.unicef.org/media/113291/file/UNICEF%20Conceptual%20Framework>

Sofyan, L. P. (2024). Analisis Determinan Stunting Di Kabupaten Bogor Dan Kota Bogor : Pendekatan Spasial Untuk Meningkatkan Efektivitas Intervensi. *Skripsi*, 1 - 3.

Hutabarat. (2022). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Journal of Health and Medical Scienc*, 158 - 163.

Kemenkes. (2022). *Survei Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Herlina, N. (2024). Edukasi Gizi Seimbang Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(3), 17 - 21.

Nisa. (2021). Sanitasi Penyediaan Air Bersih Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 10 - 12.

- Ginting, F. A. (2024). Peran Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting. *Journal of Gender and social Inclusion in Muslim Societes*, 50(1), 40 - 50.
- Sunaryo, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 205 - 213.
- Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(2), 74 - 83.
- Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1(1), 1 - 12.
- Rusdiadi. (2017). Pengertian Kebijakan. *ournal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pramono, J. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: UNISRI Press.
- Lestari, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Kecamatan Limapuluh Di Kota Pekanbaru. *Skripsi*, 43 - 47.
- Sugiyono, P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Vol. 87). Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, M. R. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Meda No 18 tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan stunting. *Skripsi*, 30 - 37.
- BPS Kabupaten Bogor. (2024). *Kecamatan Cigombong dalam Angka (Cigombong District in Figures)* (Vol. 25). Bogor: BPS kabupaten Bogor.

- Pratidina, G., Yuniar, P. G., Wahyudin, C., Rahwati, R., Apriliani, N. V., Firliandoko, R., . . . Sastrawan, B. (2025). Implementation Of The Program Policy To Accelerate Stunting Reduction. *Jurnal Governansi*, 11(1), 103 - 118.
- Nuranti, A., Rahmawati, R., & Lyndo, N. A. (2025). Peran Penyuluhan dan Edukasi Program Bangga Kencana oleh Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Stunting Pada Anak di Daerah Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 11 - 18.
- Fahriza, E. (2021). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kamapr. *Skripsi*, 10 - 35.
- Ginting, G. R. (2022). Determinan Asupan zat Gizi Makro dan Mikro dalam Mendeteksi Stunting Pada 3-5 Tahun di Kelurahan Helvetia Lingkungan Xi Tahun 2022. *Skripsi*, 20 - 25.
- Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 6(1), 1 - 8.
- Sahila, A. N., Purnamasari, I., Hermawan, D., Ramadhani, F. T., Apriliani, A., Rahmawati, R., Apriliani, N. V. (2024). Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(10), 11506-11512.
- Ramadhani, F. T., Lutfie, M., & Zenju, N. S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni Di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 40 - 47.
- Kurnia, Y. S., Ramdani, F. T., & Rahmawati, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid - 19(Studi Kasus di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor). *Jurnal Governansi*, 8(2), 153 - 161.

Yuliani, R., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Karimah Tauhid*, 2(1), 256 - 260.